

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan terkait faktor-faktor penghambat penyelesaian konflik Hutan Register 45 mesuji, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Faktor internal penghambat penyelesaian konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji pada dasarnya dikarenakan Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonomi Baru. Hal tersebut berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Terpadu penyelesaian konflik Hutan Register 45 Mesuji. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola konflik di internal pemerintah dapat dilihat dari kurangnya jumlah personil dan kurangnya pengalaman anggota Tim Terpadu dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan Hutan Register 45 Mesuji. Selain itu, faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik di internal pemerintah yaitu terbatasnya dana yang dianggarkan untuk penyelesaian konflik-konflik kehutanan karena dana yang ada lebih diutamakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Faktor lain yang menjadi hambatan penyelesaian konflik di internal pemerintah yaitu karena belum adanya satu persamaan persepsi dalam upaya penegakan hukum antara penegak hukum dengan Komnas HAM.

2. Faktor eksternal penghambat penyelesaian konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji meliputi:
 - a. Faktor penghambat disisi eksternal masyarakat perambah disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum, salah satunya yaitu mereka dengan sengaja melanggar hukum dan mengabaikan himbauan-himbauan dari pemerintah untuk tidak tinggal di kawasan hutan. Dengan alasan untuk pemenuhan ekonomi, masyarakat dengan sengaja membuka lahan di kawasan Hutan Register 45 Mesuji untuk dimanfaatkan sebagai ladang pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhannya. Mereka meneruskan tradisi dari nenek moyang mereka dengan menebang pohon-pohon di kawasan hutan dan membuka lahan baru sebagai tempat tinggal mereka. Masyarakat perambah benar-benar sudah berani melanggar hukum dan menentang pemerintah karena adanya kekuatan pendukung perambah yang sangat kuat dan perambah sudah terorganisir secara rapi sehingga mereka sudah benar-benar siap melawan pemerintah jika akan dilakukan pengusuran secara paksa terhadap masyarakat perambah tersebut.

- b. Faktor penghambat disisi eksternal PT.Silva Inhutani Lampung yaitu adanya budaya kapitalisme yang disebabkan adanya kontrol yang sangat besar yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak perusahaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi sehingga pemerintah dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi daripada kepentingan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Hal ini yang mengakibatkan sulitnya melakukan komunikasi kepada masyarakat perambah, karena masyarakat menganggap pemerintah dan pihak perusahaan adalah musuh mereka.

B. Saran

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. Dalam pembentukan tim untuk mengatasi konflik kehutanan, harus diisi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan konflik kehutanan sehingga akan memaksimalkan kinerja tim dalam upaya penyelesaian konflik kehutanan yang terjadi.
2. Pemerintah harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan Register 45 Mesuji sehingga konflik tersebut tidak berlarut-larut.

3. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai dana dalam penyelesaian konflik agraria yang saat ini banyak terjadi diseluruh kawasan hutan di Indonesia karena anggaran untuk penyelesaian konflik sama pentingnya dengan anggaran lainnya.
4. Pemerintah harus melibatkan Komnas HAM dalam upaya penyelesaian konflik, sehingga tidak terjadi lagi pertentangan antara penegak hukum dengan Komnas HAM.
5. Pemerintah harus membatasi pemberian ijin pengelolaan kawasan hutan produksi kepada perusahaan-perusahaan asing serta memberikan kontrol besar terhadap pemberian ijin usaha kepada perusahaan asing agar pemanfaatan kawasan kehutanan dapat diberikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.